

**PROGRESSIVISME SEBAGAI LANDASAN PENGEMBANGAN  
PENDIDIKAN ISLAM: ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN  
DI INDONESIA**

*Progressivism as a Foundation for the Development of Islamic Education: An Analysis of  
Educational Policy in Indonesia*

**Purnama Danriani<sup>1\*</sup>, Salahuddin<sup>2</sup>, Jamrizal<sup>3</sup>**

*Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia<sup>1,2,3</sup>*

\*Corresponding Author: [s2.pdanriani@gmail.com](mailto:s2.pdanriani@gmail.com)

*Article Submission:*  
22 May 2026

*Article Revised:*  
12 June 2026

*Article Accepted:*  
14 June 2026

*Article Published:*  
14 June 2026

**ABSTRACT**

*This research aims to analyze the relevance of progressivism as the foundation for the development of Islamic education and examine the implementation of progressivism values in education policy in Indonesia. This study uses a qualitative approach with a literature study type. Data was obtained from relevant journal articles, books, policy documents, and laws and regulations, then analyzed using content analysis techniques through the stages of data reduction, categorization, interpretation, and conclusion drawn. The results of his research show that progressivism has a strong relevance as a philosophical foundation in the development of Islamic education in Indonesia. Analysis of various Islamic education policies shows that the principles of progressivism, such as its learning process that places students as the main subject and encourages the development of critical thinking skills, curriculum flexibility, and the integration of science and Islamic values, have begun to be accommodated in each of its educational policies, including the implementation of the Independent Curriculum, the strengthening of religious moderation, and the digital transformation of madrasas. Theoretically, these findings confirm that progressivism can be a conceptual framework that strengthens the transformation of Islamic education to be more responsive to its growing times and still hold its identity including its religious values. Thus, the development of Islamic education requires an approach that prioritizes the preservation of traditions, its ability to adapt to social changes, its technology, and the needs of modern society. The next research is recommended to conduct empirical studies on the implementation of Islamic education policies in various educational institutions, examine the effectiveness of digital transformation of madrasas and Islamic boarding schools, and explore the application of progressivism principles in Islamic education learning and management practices.*

**Keywords:** *Islamic Education, Progressivism, The Urgency of Education Policy*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi progressivisme sebagai landasan pengembangan pendidikan Islam serta mengkaji implementasi nilai-nilai progressivisme dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan

jenis studi literatur. Data diperoleh dari artikel jurnal, buku, dokumen kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitiannya bahwa progressivisme mempunyai relevansi yang kuat sebagai landasan filosofis dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Analisis terhadap berbagai kebijakan pendidikan Islam menunjukkan bahwa prinsip-prinsip progressivisme, seperti proses pembelajarannya yang menempatkan siswanya sebagai subjek utama serta mendorong berkembangnya kemampuan berpikir kritis, fleksibilitas kurikulum, serta integrasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman, telah mulai terakomodasi di tiap-tiap kebijakan pendidikannya, termasuk penerapannya Kurikulum Merdeka, penguatan moderasi beragama, dan transformasi digital madrasah. Secara teoritis, temuan ini menegaskan bahwa progressivisme dapat menjadi kerangka konseptual yang memperkuat transformasi pendidikan Islam agar lebih responsif pada zamannya yang berkembang dan masih memegang identitasnya termasuk nilai keagamaannya. Dengan demikian, pengembangan pendidikan Islam memerlukan pendekatan yang mengutamakan pelestarian tradisi, kemampuannya beradaptasi pada perubahan sosialnya, teknologinya, maupun kebutuhan masyarakat modernnya. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi empiris mengenai implementasi kebijakan pendidikan Islam di berbagai lembaga pendidikan, mengkaji efektivitas transformasi digital madrasah dan pesantren, serta mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip progressivisme dalam praktik pembelajaran dan manajemen pendidikan Islam.

**Kata Kunci:** Pendidikan Islam, Progresivisme, Urgensi Kebijakan Pendidikan

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrumen fundamental dalam pembangunan bangsa karena berfungsi tidak hanya sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter, nilai, dan identitas sosial masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pendidikan memiliki posisi strategis sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Mahrowi, 2025). Oleh sebabnya itu, arah dan kompetensi pengembangan sangat dipengaruhi oleh kebijakan negara yang lahir dari proses politik, ideologi, serta dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat. Setiap kebijakan pendidikan pada hakikatnya merupakan refleksi dari visi negara terhadap kualitas SDM-nya yang ingin diwujudkan.

Pendidikan Islam memegang peranan strategis dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Keberadaannya tidak hanya memiliki akar historis yang kuat sejak masa pra-kemerdekaan, namun berkontribusi pada terbentuknya karakter bangsa serta penguatan nilai-nilainya keagamaan di tengah masyarakat. Secara yuridis, eksistensi pendidikan Islam memperoleh legitimasi melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menempatkan madrasah dan pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional (Aulia & Sabrifha, 2026). Pengakuan tersebut semakin diperkuat melalui UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang memberikan ruang lebih luas bagi pengembangan lembaga pendidikan Islam dalam kerangka pembangunan nasional.

Meskipun demikian, perkembangan pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks. Sejarah mencatat bahwa pendidikan Islam pernah mengalami marginalisasi pada masa kolonial, pengawasan yang ketat pada masa Orde Baru, hingga memperoleh pengakuan yang lebih luas pada era Reformasi (Novrandianti et al., 2024). Dinamika tersebut menunjukkan bahwa arah perkembangan pendidikan Islamnya tidak

terlepas dari kebijakan politiknya pendidikan yang berlaku. Dalam konteks kontemporer, tantangan globalisasi, perkembangan teknologi digital, serta tantangannya pengetahuan di abad ke-21 membangun pendidikan Islam guna pelaksanaan transformasi agar mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif tanpa kehilangan identitas keislamannya (Abrar, 2024).

Berbagai kebijakan pendidikan yang diterapkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, seperti implementasi Kurikulum Merdeka, penguatan moderasi beragama, digitalisasi pembelajaran, dan revitalisasi pendidikan keagamaan, menunjukkan adanya upaya untuk menjawab tantangan perubahan zaman. Namun demikian, berbagai persoalan masih ditemukan dalam implementasinya, antara lain kesenjangan mutu antar lembaga pendidikan Islamnya, SDM-nya yang terbatas, disparitas sarana dan prasarana, serta kompleksitas tata kelola kelembagaan (Supardi et al., 2025). Situasi tersebut membuktikan pengembangan pendidikan Islamnya memerlukan landasan filosofis yang mampu menjembatani kebutuhan pelestarian nilai-nilai Islam dengan tuntutan perubahan sosial yang semakin dinamis.

Salah satu aliran filsafat pendidikan yang relevan untuk menjawab tantangan tersebut adalah *progressivisme*. *Progressivisme* memandang pendidikan sebagai proses yang dinamis, terpusat pada siswanya, pengalaman diutamakan, serta pengarahannya guna pengembangan keterampilannya berpikir kritis untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta pemecahan masalah (Rahmani et al., 2025). Melalui perspektifnya ini, pendidikannya tidak hanya dimanfaatkannya agar mewariskan pengetahuan, namun membekali peserta didik dengan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial (Krisdiyansah & Mulyanal, 2022). Prinsip-prinsip tersebut mempunyai keterkaitan dengan kebutuhan pengembangan pendidikan Islamnya di era modern yang menuntut nilai-nilai keislamannya serta kompetensi global.

Kajian mengenai pendidikan Islam dan kebijakan pendidikan di Indonesia sebenarnya telah banyak dilakukan. Penelitian oleh Furqan (2019) menyoroti tantangan pendidikan Islam dalam menghadapi perubahan sosial dan modernisasi. Penelitian Hidayat dan Hsb (2025) membahas dinamika politik pendidikan Islam dalam perspektif historis, sedangkan Sa'adah et al., (2023) mengkaji implementasi Kurikulum Merdeka di lingkungan madrasah. Selain itu, Destiana et al., (2025) meneliti berbagai tantangan kebijakan pendidikan Islam dalam konteks tata kelola kelembagaan. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung membahas pendidikan Islam dari aspek kebijakan, implementasi program, atau dinamika politik secara parsial.

Hingga saat ini masih relatif terbatas penelitian yang secara khusus menganalisis kebijakan pendidikan Islam di Indonesia menggunakan perspektif filsafat *progressivisme* sebagai kerangka analisis utama. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek historis, regulatif, maupun implementatif tanpa mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip *progressivisme* telah terinternalisasi dalam kebijakan pendidikan Islam kontemporer. Oleh sebabnya itu, ada kesenjangan penelitian (*research gap*) yakni belum tersedianya temuan yang secara komprehensif menghubungkan nilai-nilai *progressivisme* dengan arah pengembangan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia.

Berdasar kesenjangannya itu, penelitiannya ini memiliki kebaruan terletak pada upaya menganalisis kebijakan pendidikan Islam di Indonesia melalui perspektif

*progressivisme* sebagai landasan filosofis pengembangan pendidikan. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi arah kebijakan pendidikan Islam yang berkembang saat ini, tetapi juga mengevaluasi relevansinya dengan prinsip-prinsip *progressivisme*, seperti fleksibilitas kurikulum, belajarnya terpusat pada siswanya, kemampuan berpikir kritisnya dikembangkan, serta *responsivitas* pada perubahan sosial. Dengan demikian, penelitian ini harapannya bisa berperan dalam memperkaya kajian konseptual terkait teorinya dan praktiknya pendidikan Islam di Indonesia.

Melalui uraian diatas, penelitiannya bertujuan guna menganalisis relevansi *progressivisme* sebagai landasan pengembangan pendidikan Islam serta mengkaji implementasi nilai-nilai *progressivisme* dalam kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) bagaimana prinsip-prinsip *progressivisme* dapat dijadikan landasan pengembangan pendidikan Islam di Indonesia? dan (2) sejauh mana kebijakan pendidikan Islam di Indonesia mencerminkan nilai-nilai *progressivisme* dalam menghadapi tantangan pendidikan kontemporer?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (*library research*). Pendekatannya terpilih sebab fokusnya ke analisis konsep *progressivisme* sebagai landasan pengembangan pendidikan Islam serta relevansinya dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. Sumber data penelitian berasal dari artikel jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan *progressivisme*, pendidikan Islam, dan kebijakan pendidikan nasional. Literatur diperoleh melalui penelusuran pada basis data *Google Scholar* dengan rentang publikasi tahun 2019–2025 menggunakan kata kunci “*progressivisme*”, “pendidikan Islam”, “*Islamic education*”, “*educational policy*”, dan “kebijakan pendidikan Islam”.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) sebagaimana dikemukakan oleh Krippendorff, yaitu reduksi datanya, kategorisasi datanya, interpretasi datanya, serta penarikan kesimpulannya. Tahap reduksinya, peneliti mengidentifikasi dan pemilihan infonya berkaitan dengan prinsip-prinsip *progressivisme*, meliputi pembelajaran berpusat pada peserta didik, fleksibilitas kurikulum, pengalaman belajar, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Selanjutnya, data dikategorikan dan dibandingkan dengan berbagai kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, seperti Kurikulum Merdeka, kebijakan moderasi beragama, transformasi digital madrasah, dan penguatan kelembagaan pesantren. Tahap interpretasi dilakukan dengan menganalisis kesesuaian antara nilai-nilai *progressivisme* dan arah kebijakan pendidikan Islam yang berkembang. Untuk meningkatkan kredibilitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber melalui perbandingan berbagai literatur, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu serta pengecekan konsistensi temuan pada setiap sumber yang digunakan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Dasar *Progressivisme* dalam Kerangka Pendidikan Islam**

*Progressivisme* bisa dipahami sebagai perspektif dalam filsafat pendidikannya seharusnya tidak terpaku pada tradisi masa lalu yang statis, melainkan harus dinamis, kreatif, serta diarahkannya pada upaya mengembangkan potensinya sehingga siap

menghadapi masa depan. Dalam kerangka pendidikan Islam, progressivisme tidak berarti membuang nilai-nilai transendental (wahyu), melainkan mengaktifkan kembali semangat *ijtihad*. Hakikat progresivisme terletak pada keleluasaan siswanya dalam mengoptimalkan bakatnya serta kemampuannya secara alami tanpa tekanan otoriter (Fadlillah, 2018; Ambarita et al., 2025). Dalam konteks Islam, hal ini diwujudkan melalui metode *problem-solving* yang melatih murid/santri untuk memiliki ketajaman analisis terhadap dinamika sosial, bukan sekadar menjadi konsumen pengetahuan statis.

Jika dikaitkan dengan kebijakan kurikulum saat ini, terutama Kurikulum Merdeka, hakikat progresivisme menemukan relevansi tertingginya pada konsep Merdeka Belajar. Dimana pada kurikulum saat ini yaitu pendidikan itu harus ikut anak, bukan anak yang dipaksa ikut cetakan Pendidikan. Dulu, kita sering menganggap murid itu seperti gelas kosong yang tinggal diisi air oleh guru. Progresivisme menolak itu. Anak dianggap punya "mesin" sendiri untuk belajar.

Dan sekarang, seorang Guru akan lebih banyak memposisikan diri sebagai teman belajar atau fasilitator. Murid diberi kemerdekaan untuk bertanya dan mencari jawaban sendiri, bukan cuma duduk diam mendengarkan ceramah.

Penerapannya dalam pendidikan Islam mencakup tiga aspek utama:

- a. Pembelajaran Berbasis Masalah (*Problem-Based Learning*): menyesuaikan prinsipnya jika Islam yaitu *rahmatan lil 'alamin*, pendidikan Islam progresif mengajak santri/murid untuk tidak hanya menghafal teks, tetapi membedah masalah kemasyarakatan (seperti ekonomi, lingkungan, atau etika digital) dan mencari solusinya berdasarkan perspektif Islam. Pendidikan progresif harus mampu mengintegrasikan nilai religius dengan literasi digital agar murid tidak gagap menghadapi disrupsi teknologi. Progresivisme Islam di era modern harus berfokus pada "kemandirian berpikir". Pendidikan Islam tidak boleh hanya menjadi transmisi nilai masa lalu, tetapi harus menjadi alat pembebasan intelektual yang memungkinkan murid menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan identitas moralnya (Brutu et al., 2023).
- b. Guru sebagai Fasilitator: Peran guru bergeser dari "sumber tunggal kebenaran" menjadi mitra dialog. Di era informasi yang melimpah, tugas pendidik adalah membantu murid memvalidasi informasi. Di madrasah, ini berarti guru mendorong santri untuk berani berdialog dan berargumen secara sehat (syura), menjadikan kelas sebagai laboratorium kehidupan yang dinamis. Kolaborasi melalui komunitas belajar adalah kunci ketahanan pendidik (Hutasoit, 2025). Di tengah banjir informasi, kebijakan yang memfasilitasi ruang dialog antar-pendidik memungkinkan terjadinya filterisasi inovasi yang paling relevan untuk diterapkan di kelas.
- c. Keseimbangan Iptek dan Imtak: Progressivisme Islam memandang bahwa sains dan teknologi adalah alat untuk memperdalam pemahaman akan ciptaan Tuhan. Oleh sebabnya itu, kurikulum belum boleh menempatkan secara terpisah ilmu agamanya serta ilmu umumnya, melainkan mengintegrasikannya secara organik. Integrasi kurikulum adalah harga mati; sains digunakan untuk mengagumi ciptaan Allah, dan agama menjadi kompas moral dalam menggunakan teknologi tersebut. Dalam bukunya *Integrasi Kurikulum di Madrasah Progresif*, integrasi bukan sekadar menggabungkan mata pelajaran, tetapi menyatukan pandangan dunia (worldview) Islam ke dalam sains. Ia menyatakan bahwa kurikulum progresif harus mampu menghapus dikotomi ilmu

sehingga murid melihat teknologi sebagai manifestasi ayat-ayat Allah di alam semesta (Arifin & Nurhakim, 2025).

Dalam kerangka progressivisme Islam, pendidikan harus memacu terwujudnya perubahan yang berkualitas serta memanfaatkan akal guna menjawab tantangan zaman. Pada QS. Ar-Ra'd: 11

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri"

Ayatnya menjadi landasan semangat progresif untuk melakukan inovasi pendidikan adalah perintah agama. Pendidikan Islam harus dinamis dan transformatif, karena kemajuan kualitas umat bergantung pada ikhtiar perubahan yang dilakukan oleh pendidiknya. Dalam konteks transformasi pendidikan saat ini bukan sekadar pergantian kurikulum, melainkan pergeseran paradigma tentang bagaimana pembelajaran seharusnya terjadi. Secara garis besar, ikhtiar tersebut mencakup transformasi pada pola pikir, metode, hingga budaya kerja.

Berikut adalah uraian lengkap mengenai komponen-komponen utama dalam ikhtiar perubahan tersebut:

#### 1. Transformasi Pola Pikir (Mindset)

Langkah awal dan yang paling krusial adalah perubahan dari sudut pandang "Guru sebagai Pusat" (Teacher-Centered) menjadi "Murid sebagai Pusat" (Student-Centered).

- a. Keberpihakan pada Murid: Pendidik berikhtiar untuk mengenali bahwa setiap murid unik dan memiliki potensi yang berbeda. Perubahan ini menuntut guru untuk tidak lagi menyeragamkan kemampuan siswa.
- b. Pembelajar Sepanjang Hayat: Pendidik menyadari bahwa mereka juga harus terus belajar. Pendidik aktif mencari referensi baru melalui berbagai platform digital dan komunitas praktisi untuk memperbarui kompetensinya.

#### 2. Praktis Pembelajaran di Kelas

Ikhtiar ini memusatkan perhatiannya pada dinamika pembelajaran di ruang kelas dalam rangka membangun pengalaman belajarnya bermakna:

- a. Pembelajaran Berdiferensiasi: Guru berupaya menyusun konten, proses, dan produk pembelajaran yang disesuaikan dengan kesiapan, minat, dan profil belajar siswa.
- b. Pemanfaatan Teknologi: Penggunaan alat bantu digital bukan sekadar gaya hidup, melainkan untuk efisiensi administrasi dan efektivitas penyampaian materi (seperti penggunaan video interaktif atau simulasi digital).
- c. Asesmen Formatif: Fokus bergeser dari sekadar nilai ujian akhir (sumatif) menjadi penilaian selama proses (formatif). Tujuannya adalah memberikan umpan balik segera agar siswa tahu apa yang perlu diperbaiki.

#### 3. Pengembangan Kompetensi Profesional

Pendidik melakukan ikhtiar sistematis untuk meningkatkan kualitas kerjanya melalui:

- a. Pemanfaatan Platform Digital: Aktif menggunakan platform pengembangan mandiri untuk mengunduh perangkat ajar, mengikuti pelatihan mandiri, dan berbagi praktik baik.
  - b. Refleksi Diri: Secara rutin mengevaluasi praktik mengajar yang telah dilakukan. Guru mulai berani bertanya kepada murid atau rekan sejawat: "*Apa yang kurang dari cara saya mengajar hari ini?*"
  - c. Kolaborasi di Komunitas Belajar (Kombel): Tidak lagi bekerja secara terisolasi. Pendidik berikhtiar membangun ruang diskusi dengan rekan guru untuk memecahkan masalah pembelajaran bersama-sama.
4. Penciptaan Lingkungan Belajar yang Aman dan Nyaman
- Perubahan juga mencakup aspek emosional dan fisik di sekolah:
- a. Disiplin Positif: Mengganti hukuman fisik atau verbal dengan restitusi, yaitu mengajak siswa mencari solusi atas kesalahan yang mereka perbuat agar karakter mereka terbangun.
  - b. Kesejahteraan Psikologis (Well-being): Memastikan bahwa sekolah adalah tempat yang menciptakan kondisi belajar yang positif sehingga meningkatkan dorongan tanpa rasa takut.
5. Sinkronisasi dengan Manajemen Sekolah
- Ikhtiar pendidik juga berkaitan erat dengan bagaimana mereka mendukung visi kepemimpinan sekolah:
- a. Kolaborasi dengan Pimpinan: Mendukung kepala sekolah dan pengawas dalam sinkronisasi data kinerja (seperti E-Kinerja) untuk memastikan tujuan sekolah sejalan dengan rencana pembelajaran di kelas.
  - b. Keterlibatan Orang Tua: Membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan wali murid untuk mendampingi proses belajar anak di rumah.

## **B. Urgensi Kebijakan Pemerintah dalam Pendidikan Islam**

Kebijakan pemerintah bukan sekadar instrumen administratif, melainkan fondasi yang menentukan arah gerak pendidikan Islam di Indonesia. Kebijakan pemerintah berfungsi sebagai payung hukum yang mengatur ketertiban dan kemajuan pendidikan secara sistemik. Sebagus apa pun sebuah inovasi di dalam kelas, ia akan sulit berkembang jika tidak didukung oleh sistem yang besar. Di sinilah kebijakan pemerintah berperan sebagai "motor penggerak" sekaligus "pelindung". Dalam QS. An-Nisa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu..."

Ayatnya mendeskripsikan Ketaatan pada kebijakan yang maslahat (seperti kurikulum nasional atau regulasi digital) merupakan bagian dari integritas seorang pendidik Muslim. Kebijakan dari *Ulul Amri* (pemerintah) berfungsi untuk menyatukan visi pendidikan agar tercipta standardisasi mutu yang merata. Standardisasi mutu pendidikan di Indonesia pada dasarnya adalah "pagar" agar kualitas pendidikan kita tidak terlalu jauh

selisihnya antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pemerintah menggunakan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai acuan utama.

Adapun 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) itu terdiri dari :

1. Standar Isi dan Proses (Apa dan Bagaimana Belajar)  
Ini adalah "apa yang dipelajari" dan "bagaimana cara mengajarnya".
  - a. Standar Isi : Pemerintah menentukan kurikulum nasional (seperti Kurikulum Merdeka) agar semua murid mendapatkan materi dasar yang relevan dengan perkembangan zaman.
  - b. Standar Proses : Mengatur agar guru mengajar dengan cara yang interaktif dan berpusat pada murid, bukan sekadar ceramah satu arah.
2. Standar Kompetensi Lulusan (Hasil Akhirnya)  
Pemerintah menetapkan kriteria lulusan yang harus dimiliki murid setelah menamatkan pendidikan. Setelah lulus, murid minimal harus memiliki karakter profil pelajar Pancasila, punya literasi dan numerasi yang cukup, serta keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk hidup di masyarakat.
3. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kualitas Guru)  
Guru adalah ujung tombak. Pemerintah menetapkan kualifikasi dan kompetensi guru. Guru harus punya sertifikasi atau standar kemampuan tertentu agar cara mengajarnya seragam dan berkualitas.
4. Standar Sarana dan Prasarana (Fasilitas)  
Sekolah harus punya "rumah" yang layak untuk belajar. Ada aturan soal jumlah ruang kelas, lab, perpustakaan, hingga akses internet. Tujuannya supaya anak-anak tidak belajar di tempat yang membahayakan atau kekurangan alat pendukung.
5. Standar Pengelolaan dan Pembiayaan (Manajemen)  
Ini menyangkut bagaimana sekolah diatur dan bagaimana uang dikelola. Sekolah harus punya manajemen yang transparan dan keuangan yang cukup (misalnya lewat dana BOS) agar operasional sekolah tidak terhambat.
6. Standar Penilaian (Ukurannya)  
Ini adalah cara pemerintah mengecek apakah mutu pendidikan sudah tercapai. Menggunakan instrumen seperti Asesmen Nasional (AN) atau Rapor Pendidikan. Kita jadi tahu sekolah yang telah mencapai kategori unggul dan sekolah yang masih membutuhkan intervensi (AM, 2021).

Urgensi kebijakan ini terletak pada beberapa faktor krusial:

1. Standardisasi dan Pemerataan Mutu: Banyak institusi pendidikan Islam (seperti madrasah swasta dan pesantren) memiliki keterbatasan sumber daya. Kebijakan pemerintah melalui regulasi akreditasi dan penyaluran bantuan (seperti dana BOS atau sertifikasi pendidik) menjadi penopang utama agar pendidikan Islam tidak terpinggirkan dari standar nasional. Kebijakan pendidikan Islam harus mampu melakukan pemetaan mutu yang komprehensif (Sari et al., 2025). Kebijakan sertifikasi dan alokasi anggaran bukan sekadar prosedur teknis, melainkan langkah strategis pemerintah untuk mengikis kesenjangan kualitas antara lembaga pendidikan umum dan agama, sehingga tercipta integrasi standar nasional yang kokoh.

2. Pemerataan Kualitas melalui Regulasi: Kebijakan seperti akreditasi dan bantuan operasional bukan sekadar urusan administratif. Kebijakan berfungsi mengkonsolidasikan sumber daya agar madrasah swasta di pelosok memiliki kesempatan yang sama untuk maju seperti sekolah di kota.
3. Transformasi Digital yang Terarah: Kehadiran Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan E-Kinerja adalah bukti nyata kebijakan yang progresif. Kebijakan digitalisasi pendidikan Islam bukan hanya soal pengadaan laptop, tetapi soal membangun ekosistem di mana guru-guru madrasah bisa saling berbagi metode mengajar yang inovatif secara nasional tanpa sekat geografis. Kebijakan ini memberikan panggung bagi guru di pelosok untuk memiliki standar kualitas yang sama dengan guru di pusat kota melalui ekosistem digital yang terintegrasi.
4. Payung Hukum bagi Inovasi: Tanpa kebijakan yang adaptif, guru seringkali takut berinovasi karena terbentur aturan kurikulum yang kaku. Pemerintah berperan memberikan ruang legal agar eksperimen pembelajaran di sekolah tetap diakui dalam Standar Nasional Pendidikan (Supardi et al., 2025; Safitri & Julaiha, 2026).

### C. Kolaborasi Ideal: Inovasi Pendidikan dan Kebijakan

Bentuk kolaborasi ideal antara inovasi pendidikan dan kebijakan adalah hubungan yang bersifat simbiotik-mutualistik. Artinya, inovasi di lapangan memberikan masukan kepada pembuat kebijakan, dan kebijakan memberikan dukungan bagi keberlanjutan inovasi tersebut.

Kolaborasi ideal antara praktisi (guru/pengawas) dan pembuat kebijakan harus berlandaskan pada prinsip dialog, bukan lagi soal "perintah dan kepatuhan", melainkan soal dialog. Jika hubungan ini tidak dilandasi komunikasi dua arah, kebijakan sebagus apa pun akan terasa seperti beban saat diterapkan di lapangan. Prinsip dialog menuntut keterbukaan. Tidak ada yang ditutup-tutupi mengenai kendala anggaran, fasilitas, atau kemampuan sumber daya manusia. Ketika sebuah kebijakan akan diluncurkan, praktisi dilibatkan sejak tahap perencanaan. Dengan begitu, praktisi merasa memiliki kebijakan tersebut (*sense of ownership*) dan lebih bersemangat menjalankannya karena mereka ikut "meracik" aturannya.

QS. Asy-Syura: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya : juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka

Penjelasannya: Mekanisme Komunitas Belajar (Kombel) atau forum diskusi antara pengawas dan kepala sekolah adalah bentuk nyata dari implementasi *Syura*. Melalui dialog ini, inovasi dari bawah dapat diangkat menjadi kebijakan yang inklusif dan berbasis data lapangan. Hal ini merupakan kunci agar aturan yang dibuat pemerintah tidak hanya indah di atas kertas, tetapi juga benar-benar menyentuh kebutuhan nyata masyarakat sekolah. Kalau kebijakan cuma inklusif tapi tidak punya data, pemerintah mungkin punya niat baik

untuk menolong semua orang, tapi tidak tahu caranya secara efektif. Sebaliknya, kalau kebijakan berbasis data tapi tidak inklusif, pemerintah mungkin tahu masalahnya, tapi hanya peduli pada mayoritas dan mengabaikan kelompok kecil yang juga butuh bantuan.

Contoh Nyata dalam Kurikulum Sekarang:

Pemerintah menggunakan Rapor Pendidikan dan Asesmen Nasional. Data dari rapor pendidikan ini adalah "data lapangan". Dari sana, sekolah dan pengawas bisa berdiskusi: "*Oh, nilai literasi kita rendah, mari kita buat program inklusif yang membantu anak-anak yang lambat membaca.*"

Kolaborasi ini dapat terwujud melalui:

1. Otonomi Berbasis Kearifan Lokal: Kebijakan yang baik adalah yang tidak menyeragamkan semua hal. Madrasah harus diberi ruang untuk mengembangkan keunggulan khasnya apakah itu di bidang agribisnis, teknologi, atau tahfidz selama tetap dalam koridor mutu nasional. Bentuk otonomi yang ideal bagi madrasah adalah 'fleksibilitas dalam koridor'. Madrasah progresif harus diberi ruang untuk mengadopsi kurikulum berbasis kearifan lokal yang mendukung kesiapan menghadapi tuntutan pasar kerja masa depan, untuk penjamin ketercapaian kompetensi dasar religius dan akademik secara simultan (Hakim et al., 2024).
2. Komunitas Belajar (Kombel) sebagai Wadah Sinergi: Pemerintah memfasilitasi ruang bagi praktisi untuk saling pamer "praktik baik". Inovasi yang berhasil di satu daerah bisa diangkat oleh pengawas sekolah untuk dijadikan percontohan di daerah lain, menciptakan gerakan perubahan yang organik dari bawah ke atas.
3. Kebijakan Berbasis Data (*Data-Driven Policy*): Di masa depan, kebijakan tidak boleh lagi berdasarkan asumsi. Dengan pengisian data yang rutin oleh guru melalui sistem digital, pemerintah bisa memberikan intervensi yang tepat sasaran, misalnya memberikan pelatihan khusus pada area yang memang masih lemah (Fanani, 2020)

Dengan kolaborasi ini, pendidikan Islam tidak akan kehilangan identitas religiusnya, namun tetap memiliki daya saing (progresivitas) yang kuat di tengah arus perubahan dunia.

#### **D. Integrasi Iptek dan Imtak (Ulul Albab)**

Pendidikan progresif Islam tidak memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum.

QS. Ali 'Imran: 190-191

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

Artinya : "*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal (Ulul Albab)...*"

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۗ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Artinya : yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka.

Penjelasannya : Konsep *Ulul Albab* menuntut murid untuk memiliki ketajaman intelektual (berpikir kritis/progresif) sekaligus kedalaman spiritual. Literasi digital dan

teknologi harus dipandang sebagai wasilah (perantara) untuk memahami keagungan ciptaan Allah. Dan hal ini adalah cara kita menempatkan iman di atas kemajuan zaman. Teknologi bukan sekadar alat untuk pamer atau mencari hiburan, melainkan "mikroskop" dan "teleskop" spiritual untuk melihat kebesaran-Nya. Dimana Mikroskop sebagai alat ketika kita melihat video tentang sel tubuh yang sangat kecil atau cara kerja semut, kita sadar: "*Luar biasa, Tuhan mengatur hal sekecil ini dengan sangat rapi.*"

## **KESIMPULAN**

Kesimpulannya diketahui bahwa progressivisme mempunyai relevansi yang kuat sebagai landasan filosofis dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islamnya di era kontemporer yang fungsinya melebihi transmisi nilai-nilai keagamaan, yaitu bisa menjadi hal strategis menjadikan siswanya berkarakter, kritis, adaptif, serta bisa menjalani tantangan globalnya. Analisis terhadap berbagai kebijakan pendidikan Islam menunjukkan bahwa prinsip-prinsip progressivisme, seperti proses pembelajarannya yang menempatkan siswanya sebagai subjek utama serta mendorong berkembangnya kemampuan berpikir kritis, fleksibilitas kurikulum, serta integrasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman, telah mulai terakomodasi di tiap-tiap kebijakan pendidikannya, termasuk penerapannya Kurikulum Merdeka, penguatan moderasi beragama, dan transformasi digital madrasah. Secara teoritis, temuan ini menegaskan bahwa progressivisme dapat menjadi kerangka konseptual yang memperkuat transformasi pendidikan Islam agar lebih responsif pada zamannya yang berkembang dan masih memegang identitasnya termasuk nilai keagamaannya. Dengan demikian, pengembangan pendidikan Islam memerlukan pendekatan yang mengutamakan pelestarian tradisi, kemampuannya beradaptasi pada perubahan sosialnya, teknologinya, maupun kebutuhan masyarakat modernnya.

Dari perspektif kebijakan, hasil penelitiannya mengimplikasikan keperluan kuatnya kebijakan pendidikan Islam yang lebih progresif, inklusif, dan berbasis kebutuhan nyata peserta didik melalui kualitas SDM-nya yang ditingkatkan, pemerataan sarana prasarannya, penguatan transformasi digital, serta tata pengelolaannya pendidikan berbasis data. Hubungan antara pemerintahannya, lembaga pendidikan Islamnya, pendidikannya, serta masyarakatnya menjadi faktor penting mewujudkan sistem pendidikan Islam yang berkualitas serta berdaya saing. Keterbatasan penelitiannya terfokus pada kajian literturnya maupun analisisnya dokumen kebijakan, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi empiris mengenai implementasi kebijakan pendidikan Islam di berbagai lembaga pendidikan, mengkaji efektivitas transformasi digital madrasah dan pesantren, serta mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip progressivisme dalam praktik pembelajaran dan manajemen pendidikan Islam. Kajian lanjutan harapannya bisa memberi bukti empiris yang lebih menyeluruh guna mendukung yang relevan dengan tantangan abad ke-21 kebijakan pendidikan Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abrar, M. (2025). Pendidikan Islam dalam perspektif epistemologi Islam: Tantangan dan peluang abad 21. *Jurnal Seumubeuet*, 4(1), 44-59.
- AM, E. N. (2021). *Pendidikan dan profesi keguruan dalam membangun sumber daya*

- manusia (SDM)*. Samudra Biru.
- Ambarita, D., Dahliah, J., Edwar, Y., Hartati, M. S., & Susiyanto, S. (2025). Perspektif filsafat progresivisme dalam kurikulum merdeka. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 3(1), 366-380.
- Arifin, S., & Nurhakim, M. (2025). *Strategi Penguatan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah*. UMMPress.
- Aulia, A., & Sabrifha, E. (2026). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia: Studi Pustaka Terhadap Regulasi Dan Implementasinya. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan dan Teknik*, 3(3), 10-15.
- Brutu, D., Annur, S., & Ibrahim, I. (2023). Integrasi Nilai Filsafat Pendidikan Dalam Kurikulum Merdeka Pada Lembaga Pendidikan Islam. *Jambura Journal of Educational Management*, 442-453.
- Destiana, E. M., Puspasari, N., & Dewi, D. E. C. (2025). Evaluasi Strategi Pengembangan Stakeholders dalam Penguatan Kelembagaan Pendidikan Islam. *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 173-188.
- Fadlillah, M. (2018). Aliran progresivisme dalam pendidikan di Indonesia. *Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(1), 17-24.
- FANANI, Z., & NEGERIJEMBER, P. A. I. (2020). *KEPEMIMPINAN KIAI DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MASYARAKAT DI PESANTREN RAKYAT AL AMIN SUMBERPUCUNG MALANG.c*
- Hakim, I. R., Unnajah, S., & Rahman, A. S. (2024). Adaptive Strategies of Madrasah in Implementing The National Curriculum and Madrasah Operational Curriculum: Strategi Adaptif Madrasah Dalam Implementasi Kurikulum Nasional dan Kurikulum Operasional Madrasah. *Edukasi: Journal of Educational Research*, 4(3), 19-36.
- Hidayat, R., & Hsb, Z. E. (2025). DINAMIKA POLITIK PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF SEJARAH DAN KONSTITUSI INDONESIA. *Al-Muhajirin: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2).
- Hutasoit, D. T. (2025). Guru Penggerak sebagai agen transformasi pendidikan: Tinjauan literatur terhadap peran, tantangan, dan kolaborasi. *Jurnal Pendidikan MIPA*, 15(2), 551-561.
- Krisdiyansah, Y., & Mulyana, A. (2022). Degradasi fungsi-fungsi pendidikan dalam pewarisan dan perubahan nilai-nilai sosial dan budaya. *TANZHIMUNA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 115-130.
- Mahrowi, A. F. (2025). Polemik Pendidikan di Indonesia antara Hak Rakyat dan Tanggungjawab Negara. *Educatum: Jurnal Dunia Pendidikan*, 3(1), 13-32.
- Novrandianti, N., Firdaus, E., & Anwar, S. (2024). Pendidikan Islam Di Indonesia: Dari Awal Penyebaran Islam Hingga Era Reformasi Pendidikan. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 14(2), 279-294.
- Rahmani, E. Y., Ramandhani, H. P. C., & Bakar, M. Y. A. (2025). Progresivisme dan Rekonstruksionisme sebagai Paradigma Pendidikan untuk Transformasi Individu dan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(6), 751-769.
- Sa'adah, K., Ainol, A., & Izzah, I. (2023). Kepemimpinan transformasional kepala madrasah terhadap implementasi Kurikulum Merdeka di Probolinggo. *Al-Fahim:*

*Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 120-135.

Safitri, Y., & Julaiha, S. (2026). Implementasi standar nasional pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. *Andragogi: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 6(1), 1-8.

Sari, R., Elvarisna, E., & Jamilus, J. (2025). DOKUMEN MUTU DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM: KONSEP DAN INTEGRASI BUDAYA ORGANISASI. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(4), 2698-2708.

Supardi, S., Fauzi, A., Aminah, N., Maryati, M., & Nursaidah, N. (2025). Analisis Kebijakan Kesetaraan Akses Dan Mutu Pendidikan Studi Multidimensi Pada Sekolah Menengah Umum, Madrasah Dan Pendidikan Tinggi Pesantren. *Jurnal Education And Development*, 13(1), 479-490.